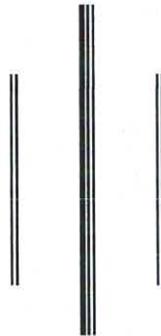




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA – OPD)
TAHUN 2024**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TUAPEJAT 2023**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya lah, kami dapat membuat dan menyelesaikan bahan Rencana Kerja Tahun 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kepulauan Mentawai perihal Permintaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyusun Rencana Strategi selama 4 (empat) tahun 2023-2026 dan selanjutnya di tuangkan didalam Rencana Kerja tahunan sebagaimana dimaksud sesuai dengan permintaan.

Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023 namun tetap butuh alokasi anggaran untuk mengakomodir sarana dan prasarana serta program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sebuah OPD. Rencana kerja ini menggambarkan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 dan merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Tuapejat, Oktober 2023

KEPALA DINAS



MUHAMMAD IRSAL,S.Pd.,M.SI
NIP. 196711101997021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KERANGKA ACUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021.....	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024 merupakan modifikasi makna dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rencana Strategi (RENSTRA) dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara normatif, penyusunan dokumen ini di dasari oleh semangat dan makna dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, *vide* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena disamping dokumen ini merupakan suatu pedoman penyusunan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, tetapi dokumen ini juga mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam penentuan efisiensi optimalisasi pelaksanaan agenda program kegiatan.

Dalam sistem administrasi penanganan urusan pemerintah sebagaimana tertuang kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok-pokok pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Keberhasilan kinerja suatu organisasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan diukur melalui berbagai indikator-indikator dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan/evaluasi. Pengukuran kinerja tersebut merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan merupakan jembatan antara perencanaan strategi dan akuntabilitas. Dalam era otonomi daerah, aspek perencanaan memiliki peranan penting dalam membina serta mengembangkan otonomi daerah, karena melalui perencanaan, jauh sebelum terjadi perwujudan pembangunan, masyarakat lebih banyak mengerti tentang situasi daerahnya dan peranannya untuk berpartisipasi. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa perencanaan akan menjadi katalisator pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat memahami tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah atas dasar otonomi yang dimilikinya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya pembangunan merupakan unsur perencanaan yang mempengaruhi kelancaran serta pencapaian

target yang akan direncanakan. sedangkan perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan pembangunan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah akan tetap memegang peranan penting didalam proses pembangunan nasional maupun daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Dengan penelaahan perencanaan pembangunan tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti. Hal tersebut menunjukkan urutan-urutannya saja, sebab didalam kegiatan perencanaan pembangunan nanti diharapkan bisa terkontrol dan kegiatan pembangunannya bisa berjalan dengan lancar.

Agenda program kegiatan yang bersifat prioritas maupun non prioritas dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung oleh dokumen yang terorganisir dan terencana sesuai menurut Tugas Pokok dan Fungsi. Karena untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara teknis, dokumen ini sudah merupakan konsekuensi logis bagi perangkat daerah yang hendak memformulasikan berbagai ide dan masukan dari spektrum yang lebih luas.

Salah satu pertimbangan dan indikator untuk memacu keberhasilan kinerja sesuai menurut standar pelayanan minimal dilingkup Organisasi Perangkat Daerah adalah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi dari program kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian, disamping dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bermanfaat sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan dan kendala yang dianggap telah terlaksana maupun dihadapi.

Untuk terjaminnya pelaksanaan program kegiatan secara optimal, efektif, efisien dan terencana, maka setiap proses perencanaan perlu dilakukan berbagai tahapan yang salah satu diantaranya yakni regulasi yang baik dan memperoleh kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai menurut hukum normatif.

Dokumen ini disamping sebagai agenda dalam penyusunan perencanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bertujuan sebagai kerangka dalam mewujudkan pelayanan publik kearah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016, maka secara hukum administrasi kebijakan publik, dinas tersebut memiliki peran dan tanggungjawab untuk mensukseskan pembangunan daerah dan mengaktualisasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berangkat dari uraian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, untuk menformulasikan peran dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut patuh dan taat serta profesional kepada Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana telah diatur kedalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016.

Oleh karena itu, tanggungjawab dan beban kerja yang semakin berat dalam pengambilan sebagian urusan pemerintah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut perlu memperhatikan dan menetapkan berbagai langkah-langkah dalam upaya penyusunan perencanaan program kerja tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Agenda yang diformulasikan kedalam dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahunan ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, baik yang bersifat prioritas maupun non prioritas dilingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu dokumen ini juga bermanfaat sebagai bentuk acuan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedalam bentuk-bentuk program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehingga dengan demikian, untuk menentukan indikator keberhasilan kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Organisasi Perangkat Daerah, maka dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

Berangkat dari maksud dan tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dokumen ini hendaknya diharapkan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan kedalam format-format optimalisasi penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU (2022)

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan capaian Renstra OPD kondisi dan perkiraan capaian Tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun sebelumnya.

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan tahun 2023 dan capaian renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana strategis Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Terdapat 4 Program pada Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

Dari empat jumlah program tersebut terdapat 16 (enam belas) kegiatan, semua program dan kegiatan realisasi keuangan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Pada dasar program / kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan walaupun masih banyak yang harus dikerjakan untuk kedepan agar apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan dengan semestinya.

- b. Program / kegiatan yang telah memenuhi target realisasi keuangan.

Pada dasarnya program / kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun yang lalu sudah memenuhi target yang diinginkan, dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Nama Kegiatan	Realisasi 2022	Persen	Realisasi 2023	Persen
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3.085.850	41,23	68.263.59 1	97,52

	Bangunan Kantor				
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.708.500	99,19	468.340.000	93,74
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93,730,870	99,52	111.644.020	98,48
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.249.600	100	26.109.600	100
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.200.000	91,66	14.400.000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.926.000	23,90	99.553.865	99,05
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.035.672	82,27	33.959.520	46,02
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.666.000	98,98	907.116.000	99,65
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.932.750	27,58	0	0
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	0.00	0,00	0.00	0,00
11	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	465.971.900	59,52	294.079.800	95,81
12	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan buku terkait Pendaftaran	0.00	0,00	0.00	0,00

	Penduduk sesuai dengan kebutuhan				
13	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	336.180.500	64,74	130.824.500	99,48
14	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait pencatatan sipil	291.584.802	45,54	159.594.259	86,7
15	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	19.980.000	79,92	0	0

- c. Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk Program /Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun yang lalu sudah melebihi target hasil /keluaran yang direncanakan, untuk hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat di table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang/UsuranPemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluarankegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan realisasikerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program dan kegiatan (renja)perangka tdaerahtahun 2022	Perkiraanrealisasicapaian target perangkatdaerah s/d tahun 2020	
					Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat at realis asi(%)		Realisasicapaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaianreal isasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Urusan Wajib BukanPelayanan Dasar									
2	UrusanPemerintahanBidangKependudukan dan pencatatan sipil									
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2,346,360,360	1,912,376,754	6.262.212.781	4.768.747,624	93	2,525,554,490	2,356,607,087	100
2	10 01 02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 Rekening	2 Rekening	2 rekening	2 rekening	100	2 rekening	14	100
2										
2	10 01 07	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63 orang	63 orang	58orang	58 orang	100	44 orang	151	100
2	10 01 08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	3	100
2	10 01 10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 jenis	35 jenis	2jenis	2 jenis	100	37 jenis	109	100
2	10 01 11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55 buah	55 buah	55 buah	55 buah	100	55 buah	165	100
2	10 01 12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13 jenis	13 jenis	2 jenis	2 jenis	100	-	13	-

2	10	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianyabahanbacaan dan peraturanperundang-undangan	12 bulan	12 bulan	2 media surat kabar	2 media surat kabar	100	2 media surat kabar	6	100
2	10	01	17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi antar SKPD luar Daerah	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	100	24 kali	72	100
2	10	01	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Listrik dan Air	8 kali	8 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	78	100
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Telesaiannya Alat Kebersihan Kantor	29,100,000	26,323,900	10.913.600	10.913.600	100	94,620,000	214,803,150	100
2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya pajak kendaraan roda dua dan empat	-	-	6 unit	6 unit	100	1 tahun	2	100
2	10	02	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	-	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2	100
2	12	02		Program Pendaftaran Penduduk				919.332.700	300.819.700	100			
2	10	02	24	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	6 unit	6 unit	12000 dokumen	12000 dokumen	100	1	6	100
2	12	02	2.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KPT-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya KIA			5000 keping	5000 keping	100			
2	12	03		Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan			1.114.633.300	414.372.080	100	-	49,308,819	-
2	12	03	2.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan sipil	10 kecamatan	10 kecamatan	3500 dokumen	3500 dokumen	100	-	1	-
2	12	03		Komunikasi Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Terinformasinya kemasyarakatan tentang pengurusan dokumen kependudukan			2 jenis	2 jenis				
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lainnya	Terdapatnya Buku Profil			25.000.000	0				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong ke berhasilan dan beberapa factor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi perangkat daerah. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana yang belum tersedia seperti jaringan sinyal HP di daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan adminduk digital
- b. Sulitnya menempuh daerah yang terdiri dari pulau pulau dan memakan biaya BBM yang tinggi.

Berikut Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dengan rincian tabel 2.2 sebagai berikut

:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi/Capaian		Proyeksi		Catatan/Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
1	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	97,11	97,11	99	99	99,27	99,76	99,5	99,6		
2	Persentase penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	90,4	90,4	75	90	90,20	90,82	91,50	93,60		
3	Persentase data kependudukan yang valid dan update	80	80	85	86	85	100	95	95		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil Telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi Sumatera Barat, serta hasil telaahan RTRW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai selama ini dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Masih ada yang belum memiliki kepemilikan kartu penduduk dan tingkat keakuratan datanya;
- 2) Masih kurang jumlah kepemilikan identitas penduduk mentawai pada penduduk pendatang baik dari luar mentawai maupun warga Asing;
- 3) Masih ada penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
- 4) Sulitnya akses terhadap pelayanan kependuduk khususnya untuk wilayah Barat dan Selatan pulau siberut;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepulauan Mentawai menyusun rencana kerja yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen rencana kerja bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang.

Sasarandalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan pada masyarakat kab kep mentawai
2. Meningkatkan akurasi data kependudukan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mewujudkan tercapainya layanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan pelayanan keliling/ jemput bola ke wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sesuai dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabuapten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, prioritas perencanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut di table 2.4

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisis/kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	CP	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
2.12.0.00.0.00.12.0000	Kependudukan dan Pencatatan				6.996,011,956	Kependudukan dan Pencatatan				6.996,011,956		
2.12.01	Program PenunjangUrusanPemerintah Daerah				6.146,011,966	Program PenunjangUrusanPemerintah Daerah				6.146,011,966		
	Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dok perenc perangkat daerah	6 dokumen	25.000.000							
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.279.124.85	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.941.299.847		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbayarnya gaji Pegawai	24orang	3.279.124.85	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbayarnya gaji Pegawai	24orang	2.905.299.847		
2.12.01.2.02.01												
2.12.01.2.02.02	PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbayarnya,PPK dan bendahara pengeluaran, bendahara barang	3 org	50.400.000	PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terbayarnya,PPK dan bendahara pengeluaran, bendahara barang	3 orang	36.000.000		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Terlaksananya Administrasi perkantoran	44 jenis		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Terlaksananya Administrasi perkantoran	44 jenis	25.000.000		

		Pencatatan Sipil					Pencatatan Sipil			
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	55 pk	825.470.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	55 pk	464.572.000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 paket	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Terpeliharanya peralatan kantor	6 unit	47.760.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 unit	48.660.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlahmasyarakat yang mengurus dokumen kependudukan	5000 orang		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlahmasyarakat yang mengurus dokumen kependudukan	5000 orang	
2.12.02.2.02.01	Pelayanan pendaftaran penduduk		Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	2 jenis		Pelayanan pendaftaran penduduk		Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	3 jenis	565.000,000
2.12.02.2.01.04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlahmasyarakat yang mengurus dokumen kependudukan	5000 orang	525.000.000	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlahmasyarakat yang mengurus dokumen kependudukan	5000 orang	258.284.200
2.12.02.2.02	Penataan pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya dokumen pendaftaran penduduk	1 jenis		Penataan pendaftaran penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya dokumen pendaftaran penduduk	1 jenis	25.000.000
2.12.02.2.02.02	Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko ktp-el,formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya kta	1 jenis		Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko ktp-el,formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya kta		

2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlayannya masyarakat yang mengurus dokumen pencatatan sipil	7 jenis		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlayannya masyarakat yang mengurus dokumen pencatatan sipil	7 jenis	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					Pelayanan Pencatatan Sipil				
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	kab.kepmen tawai	Jumlah masyarakat yang mengurus dokumen pencatatan sipil	7 jenis	306.967.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	kab.kepmen tawai	Jumlah masyarakat yang mengurus dokumen pencatatan sipil	7 jenis	131.506.900
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
2.12.03.2.02	Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat		Jenis informasi yang di peroleh masyarakat	3 jenis	112.750.000	Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	kab.kepmen tawai	Jenis informasi yang di peroleh masyarakat		127.201.750
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
2.12.05.2.01	Penyusunan profil kependudukan					Penyusunan profil kependudukan				
2.12.05.2.01.02	Penyusunan profile data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah buku yang dicetak	100 buku	25.000.000	Penyusunan profile data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah buku yang dicetak	100 buku	3.301.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan anggaran dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa permintaan pengadaan seperangkat alat perekaman pelayanan adminduk sebesar 2 unit dan laptop untuk 2 kecamatan yaitu kecamatan malakopa dan kecamatan siberut barat daya khusus siberut barat hanya leptop saja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat berdasarkan usulan dari masyarakat akan tetapi semua usulan belum maksimal terpenuhi. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil selalu berupaya untuk lebih memaksimalkan semua program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan akan tetapi semua tergantung pada semua pihak terutama pemerintah daerah, agar kedepannya apa yang sama-sama diharapkan tercapai terutama untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dapat di lihat dari tabel 2.5 sebagaiberikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kep mentawai	Tersedianya Pelayanan pencatatan sipil	setahun	
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kep mentawai	Tersedianya Pendaftaran Penduduk	setahun	
3	Pemeliharaan Gedung kantor	Dinas dukcapil	Terpeliharanya Gedung kantor	1 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Dalam Negeri Dirjend kependudukan untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat ke daerah.

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan dengan pelayanan jemput bola terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal. Adapun lima prioritas nasional yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. SDM berkualitas dan berdayasaing.
4. Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan transpormasi pelayanan public

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan perangkat daerah.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah ***Terwujudnya kualitas pelayanan public yang efektif dan efisien .***

b. Sasaran

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Kinerja dapat dilihat pada table sebagaiberikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan tertip administrasi Kependudukan dan perlindungan terhadap hak hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatnya akurasi data kependudukan

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 struktur organisasi bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tiga urusan yaitu urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Mentawai pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

• **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. **Kegiatan Administrasi Umum Sub Kegiatan sebagai berikut :**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyediaan makanan dan minuman.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- k. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- l. Pengadaan peralatan gedung kantor
- m. Pengadaan meubelir Gedung kantor.
- n. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

• **Program Pendaftaran Penduduk**

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Dokumen kependudukan selain blanko KTP- el , formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan

• **Program Pencatatan Sipil**

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

2. Program Pencatatan Sipil

1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat Pencatatan Sipil

• **Program Pengelolaan Profile Kependudukan**

1. Penyusunan Profile Kependudukan

- a. Penyusunan Profile data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan dan Prakiran Maju Perangkat Daerah
Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
10	Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1061	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen				100 persen	
106132	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayananadministrasi umum		21 jenis	3.983.939.950			100 persen	4.450.000
101032	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2rek	858.600.000	DAU		100 persen	900.000.000
101037	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor, PPK, bendahara pengeluaran dan bendahara barang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54 org	1.414.000.000	DAU		100 persen	1.600.000
101038	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat untuk kebersihan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44 jenis	25.000.000	DAU		100 persen	35.000.000
101030	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Kependudukan dan	33 jenis	46.779.000	DAU		100 persen	55.000.000

						Pencat atan Sipil							
1 0	1	2.0 3	1 1	Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	Tersedianyabarangcetak dan penggunaan	Dinas Kepen duduk an dan Pencat atan Sipil	11 buah	10.210.950	D A U		100 pers en	15.0 00.0 00	
1 0	1	2.0 3	1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor	TersedianyaKomponeminstalas ilistrik/peneranganbangunanka ntor	Dinas Kepen duduk an dan Pencat atan Sipil	12 jenis	6.000.000	D A U		100 pers en	10.0 00.0 00	
1 0	1	2.0 3	1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianyabahanbacaan dan peraturanperundang- undangan	Dinas Kepen duduk an dan Pencat atan Sipil	2 medi a surat kabar	17.000.000	D A U		100 pers en	20.0 00.0 00	
1 0	1	2.0 3	1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianyamakan dan minumpegawai	Dinas Kepen duduk an dan Pencat atan Sipil	24 kali	44.350.000	D A U		100 pers en	50.0 00.0 00	
1 0	1	2.0 3	1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananyaempat- rapatkoordinasi dan konsultasikeluar daerah	Luar Daerah	40 kali	347.000.00 0	D A U		100 pers en	400. 000. 000	
1 0	1	2.0 3	2 4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	JumlahPerlengkapan Gedung kantor yang diadakan	Dinas Kepen duduk an dan Pencat atan Sipil	2 unit	170.000.00 0	D A U		100 pers en	180. 000. 000	
1 0	1	2.0 3	2 8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	Dinas Kepen duduk an dan Pencat atan Sipil	1pak et	160.000.00 0	D A U		100 pers en	180. 000. 000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, PAJak, dan Perizinan kendaraan dinas operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	Dinas Kepen duduk an dan Pencat atan Sipil	6 unit	48.260.000	D A U		100 pers en	50.0 00.0 00	
				Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Dinas Kepen duduk an dan Pencat atan Sipil		10.913.600			100 pers en	15.0 000 00	
1 0	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1jeni s	3.309.806. 046	D A U		100 pers en	3.50 0.00 0.00 0	
1 0	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlahgaji ASN yang dibayarkan	Dinas Kepen duduk an dan Pencat	23 org	3.309.806.0 46	D A U		100 pers en	3.50 0.00 0.00 0	

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat di harapkan dalam masa Pandemi Covid 19 di saat ini dalam penyebaran informasi baik melalui media elektronik, media massa dan media online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat diharapkan perannya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Adapun Rencana kerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang sudah diverifikasi bagian Bidang Bappeda adalah dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	1	2	3	Indikator Kinerja					Pagu Indikato	Sum	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan / Sub kegiatan		Hasil Kegiatan/ Sub kegiatan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Lokasi	Tolokukur	Tar get	Tolokukur	Targe t	Tolokukur	Tar get	ikator	ber Dan a
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Administrasi Umum											
1 0 2. 03	1 0 03	2. 03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 per sen	Tertakannya Administrasi Umum Perkantoran	21 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	2,836,205,910	Dan a Alokasi Umum
2 1 2	1 1 2. 03	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	100 per sen	Terbayarnya rekening listrik, internet	6,00 rekening	Meningkatnya kelancaran kegiatan Perkantoran	100 per sen	858,600,000	a Alokasi Umum
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	100 per sen	Terbayarnya honor PA, PPTK, PPK dan pegawai kontrak	54 orang	Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan	100 per sen	1,415,044,960	Dan a Alokasi Umum
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	100 per sen	Tersedianya alat untuk kebersihan	44 jenis	Meningkatnya pelayanan Kebersihan Perkantoran	100 per sen	25,000,000	Dan a Alokasi Umum
2 1 2	1 1 2. 03	0 8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	100 per sen	Tersedianya alat untuk kebersihan	33 jenis	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	100 per sen	35,000,000	Dan a Alokasi Umum
2 1 2	1 1 2. 03	1 0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	100 per sen	Tersedianya alat untuk kebersihan	33 jenis	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	100 per sen	35,000,000	Dan a Alokasi Umum

BAB V

PENUTUP

Puji syukur kami ucapkan akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026 dapat diselesaikan walau masih banyak yang harus disempurnakan lagi. Dalam lingkup internal Rencana Kerja (renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 berfungsi sebagai acuan bahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 .

Melihat hal tersebut di atas maka pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai utamanya bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mendapatkan perhatian serius mengingat saat ini perkembangan teknologi pembangunan semakin pesat. Segala aspek kehidupan masyarakat sudah banyak menggunakan teknologi pembangunan. Demikian pula penerapannya dalam pemerintahan guna mewujudkan E-goverment. Melalui E-goverment ini pula diharapkan bahwa pelayanan publik dapat lebih maksimal, efektif dan efisien. Dalam perkembangannya tentu ada berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi antara lain bahwa saat ini konsep smart city belum terwujud di Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa sumber daya aparatur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat terbatas dan belum memadai, perkembangan teknologi informasi begitu pesat dan kemampuan daerah untuk mengikutinya belum maksimal

Selanjutnya diharapkan bahwa kehadiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu menjembatani sehingga perkembangan teknologi informasi dapat berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar kinerja aparatur sipil negara sehingga lebih efektif dan efisien.

Tuapejat, Oktober 2023

KEPALA DINAS



MUHAMMAD IRSAL S.Pd., M.SI
NIP. 196711101997021003